

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerjasama internasional adalah salah satu upaya suatu negara untuk mencapai kebutuhan negaranya. Kelangsungan negara-negara dalam kerja sama yang didukung oleh keterbatasan sumber daya sehingga negara melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal tersebut dapat dilihat seperti halnya negara berkembang yang menjadi mitra kerja sama strategis negara maju untuk meningkatkan kesejahteraan negaranya.

Kerja sama internasional dilakukan untuk mempertemukan kepentingan nasional antarnegara. Pelaksanaan kerja sama internasional dapat dilakukan dalam berbagai bidang berdasarkan kepentingan nasional setiap negara, salah satunya adalah kerja sama pembangunan. Kerja sama pembangunan sudah banyak dilakukan oleh negara yakni seperti, pembangunan internasional telah diasosiasikan dengan pemerintah, pemberi pinjaman multilateral, dan LSM di negara-negara kaya yang memberi bantuan pembangunan kepada negara-negara berkembang serta negara-negara miskin.

Tiongkok merupakan salah satu negara yang sedang meningkatkan kerja sama antarnegara melalui kerja sama pembangunan secara besar-

besaran. Namun, bagi Tiongkok kerja sama pembangunan bukan hanya tentang bantuan, sebaliknya dimana pendekatan Tiongkok dalam pembangunan didasarkan pada upaya keras negara ini sendiri untuk meningkatkan standar hidup material. Diplomasi Tiongkok dengan negara-negara berkembang melalui kerja sama merupakan inti dari kebijakan ekonomi luar negerinya.

BRI merupakan kegiatan ekonomi, diplomatik dan geopolitik yang beragam yang dibentuk oleh Tiongkok. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya Tiongkok untuk meningkatkan kerja samanya dengan negara lain. Proyek ini sebelumnya dikenal dengan “New Silk Road” dan berubah menjadi “One Belt and One Road”. Proyek ini merupakan kebijakan luar negeri Tiongkok yang berorientasi pada ekonomi (Lingliang, 2016). Kemudian, pada tahun 2017 kebijakan tersebut berubah menjadi BRI.

Tiongkok memandang bahwa Amerika Serikat pada masa sebelumnya sudah memiliki cengkraman di dunia, untuk menghadapi tantangan tersebut Tiongkok mulai memperluas pengaruhnya dan meningkatkan ketergantungan di beberapa negara Asia dan Afrika. Hingga pada tahun 2013, Tiongkok membuat kebijakan OBOR yang mana proyek ini sebagai upaya untuk mengembangkan hubungan dan kerja sama dalam ranah global.

Tujuan utama Tiongkok dalam proyek kerja sama tersebut adalah sebagai negara pemberi pinjaman, Tiongkok akan menyalurkan uangnya ke

beberapa negara berkembang untuk membangun infrastruktur dalam berbagai bidang, yakni transportasi, energi serta sektor lainnya. Kebijakan yang dibentuk oleh Tiongkok ini juga dilatarbelakangi dengan upaya Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh politiknya di beberapa negara anggota BRI. BRI juga ditujukan untuk mengatasi masalah infrastruktur yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dari segala segi khususnya dalam perekonomian.

Negara berkembang umumnya membutuhkan kerja sama karena pembiayaan proyek infrastruktur dinilai penting untuk mengatasi hambatan pembangunan suatu negara, meningkatkan industri dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Namun, proses pembangunan dilakukan dengan jangka waktu yang panjang, pendanaan yang besar serta jangka waktu pengembalian yang lama. Tiongkok sebagai negara maju bekerja sama dengan negara berkembang lainnya untuk membantu memenuhi kebutuhan pembiayaan mereka dan meningkatkan kemampuan dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan bantuan yang diberikan Tiongkok, Tiongkok akan berpegang pada prinsip tidak ada intervensi dalam pengejar mengejar jalur pembangunan yang sesuai dengan realitas nasional mereka, dan tidak ada campur tangan dalam urusan internal mereka.

Suatu negara membutuhkan kerja sama baik dalam hubungan bilateral, regional dan multilateral untuk mencapai kepentingan negara tersebut. Selain itu, dengan menjalin hubungan kerja sama dengan aktor lainnya seperti dalam sektor ekonomi, politik dan sosial negara dapat

mempertahankan keamanan negaranya serta menjalankan program di negaranya (J & States, 2020). Dalam mencapai kepentingan nasionalnya, suatu negara perlu untuk mengembangkan kerja sama internasionalnya agar negara tersebut mengalami kemajuan dalam segala aspek. Hal tersebut juga terjadi dalam hubungan antara negara Tiongkok dan Indonesia. Kerja sama bilateral berarti membangun hubungan yang kuat dengan lingkungan eksternalnya dan mendapat keuntungan antara satu sama lain agar dapat meningkatkan kesejahteraan negaranya.

Kontribusi besar Tiongkok dalam pembangunan lokal memiliki manfaat di beberapa negara. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia, sejak tahun 2016 Indonesia menyepakati kerja sama dengan Tiongkok melalui proyek BRI. Kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia ditandai dengan bantuan pendanaan dan tenaga kerja dari Tiongkok dalam proyek pembangunan untuk meningkatkan infrastruktur Indonesia. Proyek pembangunan yang diprakarsai oleh Tiongkok ini sebagai penyempurnaan dari OBOR.

Indonesia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang sedang gencar-gencarnya dalam melakukan pembangunan sehingga kebijakan Tiongkok melalui BRI ini sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Dimana pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, hubungan kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia semakin meningkat. Hal ini berawal ketika Tiongkok sebagai negara pertama yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Kunjungan yang dilakukan oleh Indonesia juga

tidak lepas dari tujuan strategis dalam politik luar negeri Indonesia. Kerja sama yang disepakati oleh Tiongkok dan Indonesia ditujukan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua negara.

Kerja sama Indonesia-Tiongkok di bidang infrastruktur sudah dilakukan sebelum BRI ditandatangani dan berkembang di bawah bendera BRI. Beberapa proyek tersebut antara lain dilakukan sebelum tahun 2013 terjalin kerja sama yang didanai oleh Consortium of China Construction Bank atau konsorsium perbankan lokal Indonesia dan Agung Podomoro Land (APLN) dan Pengembangan Kawasan Industri Morowali yang dimulai pada tahun 2013 antara PT. Indonesia Morowali Industrial Park dengan Tsingshan Group dan Delong Group. Pada tahun 2017, pembangunan di kawasan industri pada pabrik baja karbon, smelter dan pembangkit listrik di bawah bendera BRI (Saraswati, 2019).

Pendanaan infrastruktur melalui investasi yang dibawah oleh kerangka kerja BRI mencakup beberapa tiga sektor yakni transportasi, industri dan pariwisata. Sasaran proyek tersebut meliputi pembangunan pelabuhan, bandara, kereta api dan terminal kapal pesiar (Tempo, 2015). Beberapa proyek dari BRI yang dibawah oleh BRI yakni proyek kolaborasi meliputi kereta cepat Jakarta-Bandung, Pembangkit Listrik Ukuran Sedang di beberapa lokasi di Jawa, sektor pertambangan di Kalimantan Tengah, Kawasan Ekonomi Khusus Jonggol-Jawa Barat, Kawasan Industri Terintegrasi di Ketapang, penanaman kembali kelapa sawit di Sumatera dan

Kawasan Meikarta di Bekasi-Jawa Barat. Dari beberapa kerja sama tersebut, nilainya mencapai US \$91 miliar.

Kerja sama dalam pembangunan infrastruktur ini merupakan hal penting bagi Indonesia disebabkan karena tiga hal. Pertama, dengan mengembangkan transportasi dan energi infrastruktur, infrastruktur manajemen air dan informasi serta infrastruktur komunikasi teknologi (ICT) penting untuk perekonomian Indonesia dan bermanfaat untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Kedua, pembangunan infrastruktur harus dapat mengatasi kekurangan bahan baku material seperti (semen, besi dan aspal) di Indonesia. Ketiga, permasalahan infrastruktur di berbagai sektor akan menjadi hambatan untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dan meningkatkan pertumbuhan industri. Dengan kata lain, Indonesia membutuhkan lebih banyak investasi di bidang infrastruktur dan pada saat waktu yang bersamaan Tiongkok juga menawarkan apa yang dibutuhkan Indonesia. Tiongkok memberikan fasilitas kepada Indonesia dalam pembangunan infrastruktur skala besar dan kecil melalui proyek bersama.

Dalam kerja sama Tiongkok di Indonesia melalui BRI juga memberi keuntungan kepada Indonesia dengan membangun infrastruktur fisik dan meringankan beban pemerintah dalam pembangunan nasional. Kerja sama kedua negara tersebut dibangun atas kerja sama ekonomi yang dilakukan dalam kemitraan dengan Tiongkok. Tiongkok memberikan banyak bantuannya kepada Indonesia melalui investasi dan utang juga karena adanya unsur kepentingannya sendiri. Di mana Tiongkok berusaha untuk

mencengkeram Indonesia karena Indonesia melewati jalur perdagangannya. Sehingga melalui proyek pembangunan tersebut Tiongkok berusaha untuk mempertahankan hubungan kerja sama melalui banyaknya bantuan pembangunan.

Dalam kerja sama antara kedua negara tersebut, Tiongkok sebagai negara yang sudah memiliki keunggulan dalam berbagai hal mengakibatkan posisi Tiongkok sebagai aktor leader dalam kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia. Tiongkok menggunakan hubungan kerja sama pembangunan dengan Indonesia sebagai sarana untuk memperluas kepentingannya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya. Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok menunjukkan adanya saling kebutuhan antara kedua negara yang menghasilkan saling ketergantungan

Kerja sama pembangunan Tiongkok dan Indonesia yang semakin meningkat menimbulkan saling ketergantungan antara kedua negara. Kepentingan Tiongkok dalam upaya meningkatkan kesejahteraan negaranya, selaras dengan Indonesia yang juga berupaya meningkatkan kesejahteraan melalui proyek pembangunan. Adanya interdependensi antar kedua negara tersebut menimbulkan dampak tertentu karena terdapat perbedaan latar belakang keunggulan kedua negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dampak dari saling ketergantungan (interdependensi) dalam kerja sama pembangunan suatu negara terhadap negara lain yakni Indonesia dan Tiongkok melalui BRI.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti menjelaskan latar belakang yang menjelaskan kerja sama Tiongkok dan Indonesia yang selaras diwadahi oleh BRI menyebabkan adanya saling ketergantungan antar kedua negara. Dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dijelaskan adalah **“Bagaimana dampak dari saling ketergantungan dalam kerja sama pembangunan Indonesia-Tiongkok melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI)?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan dampak dari saling ketergantungan dalam kerja sama pembangunan Indonesia- Tiongkok melalui Belt and Road Initiative (BRI).
- b. Menguraikan unsur-unsur saling ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa manfaat atau kegunaan baik secara praktis maupun teoritis:

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang dampak-dampak dari saling ketergantungan Tiongkok -Indonesia melalui kerja sama pembangunan antara Indonesia dengan Tiongkok dalam proyek BRI.

- b. Untuk menjadi bahan teoritis akademik bagi penulisan karya tulis ilmiah dan pengembangan dunia keilmuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro khususnya jurusan Hubungan Internasional.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat sebagai gambaran dampak saling ketergantungan Indonesia melalui kerja sama pembangunan dengan aktor lain yakni Tiongkok.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian pertama dari Probo Darono Yakti pada tahun 2020 dengan judul “Belt and Road Initiative RRT: Kemunculan dan Perluasan Orde Developmentalisme Di Indo-Asia-Pasifik sebagai Tandingan Liberalisme AS”. Tujuan dari penelitian ini adalah mendalami lebih lanjut mengenai strategi raya yang dibentuk oleh RRT tersebut dalam sebuah transformasi dari era kepemimpinan terdahulu mulai Mao Tse-Tung, Deng Xiaoping, Hu Jintao, hingga Xi Jinping. Dalam penelitian tersebut, Probo menggunakan teori developmentalisme untuk menjelaskan bahwa RRT mencoba mengenalkan developmentalisme sebagai tandingan dari liberalisme yang selama ini disusun oleh Amerika Serikat.

Dari penelitian peneliti dan tesis Probo, kesamaan yang dimiliki adalah topik yang diangkat dalam penelitian Probo dan peneliti adalah proyek Tiongkok di Kawasan Indonesia. Dan perbedaannya terletak pada fokus penelitian Probo adalah perluasan orde developmentalisme di Indo-Asia Pasifik dan liberalisme Amerika Serikat. Sedangkan peneliti berfokus

pada dampak dari saling ketergantungan yang dihasilkan dari kerja sama pembangunan Tiongkok dan Indonesia melalui diplomasi pembangunan Tiongkok.

Penelitian kedua dari Artha Yudilla pada tahun 2019 dengan judul “Kerja sama Indonesia Tiongkok dalam BRI Analisa Peluang dan Ancaman untuk Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan BRI sebagai kebijakan besar dari proyek Tiongkok yang bertujuan untuk membangun kembali jalur sutra darat maupun laut. Penelitian ini menggunakan teori Geopolitik dan *Alliance Transition Theory*. Di mana Artha menjelaskan bahwa peluang kerja sama dapat memberikan peluang yang baik untuk ekonomi serta politik Indonesia.

Dari penelitian peneliti dan Artha, kesamaan yang dimiliki adalah pembahasan terkait proyek bantuan dari Tiongkok di Indonesia. Sedangkan perbedaan dari penelitian Artha dan peneliti terletak pada fokus penelitian Artha adalah peluang kerja sama BRI dapat menguntungkan Indonesia pada ekonomi dan politiknya dari sisi *interdependence*. Sedangkan peneliti berfokus pada dampak dari saling ketergantungan kerja sama yang dapat merugikan dan menguntungkan kedua negara yakni Tiongkok dan Indonesia melalui teori interdependensi.

Penelitian ketiga dari Gerri Prakoso pada tahun 2022 dengan judul “Kepentingan Tiongkok terhadap Indonesia melalui BRI dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Periode 2015-2020”.

Penelitian ini menjelaskan kepentingan Tiongkok di Indonesia melalui Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung pada tahun 2015-2020.

Perbedaan penelitian peneliti dan Gerri terletak pada konsep yang digunakan oleh Gerri adalah *Sphere of Influence*. Dimana lewat konsep tersebut Gerri berusaha menjelaskan bahwa lewat proyek BRI, Tiongkok berusaha untuk menyebarkan pengaruhnya di Kawasan Asia Tenggara khususnya dalam penelitian ini adalah Indonesia. Sedangkan, peneliti menggunakan teori interdependensi, dimana Tiongkok dan Indonesia meningkatkan kerja sama untuk kepentingan masing-masing negara melalui proyek pembangunan, dimana saling ketergantungan yang dihasilkan dapat memberikan dampak tertentu bagi kedua negara.

Penelitian keempat dari Wening Setyanti pada tahun 2018 dengan judul “China debt-trap diplomacy di Era Xi Jinping Studi Kasus: Kekalahan Sri Lanka dalam proyek Hambantota”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan debt trap yang dilakukan oleh Tiongkok di Sri Lanka dalam proyek Pelabuhan laut Hambantota. Dalam kasus tersebut, Wening menguraikan bahwa Tiongkok telah melakukan kejahatan dengan instrumen *China's debt-trap diplomacy*. Melalui bantuan pembangunan, pinjaman serta tanggungan finansial dengan angka yang besar, Tiongkok menggunakan strategi tersebut sebagai strategi untuk meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok melalui kerja sama pembangunan dalam bentuk pinjaman utang dan investasi

Perbedaan penelitian Wening dan peneliti terletak pada kasus yang dibahas yakni Wening menggunakan kasus dalam proyek Hambantota, sedangkan peneliti menggunakan proyek pembangunan di Indonesia. Kesamaan dari penelitian Wening dan peneliti terletak pada teori yang digunakan Wening dan peneliti yakni teori saling ketergantungan.

1.6.Kerangka Pemikiran

1.6.1 Teori Saling Ketergantungan (interdependensi)

Interdependensi merupakan teori yang lahir dari perspektif neoliberalisme, saling ketergantungan muncul dari adanya kerja sama yang dilakukan antar dua negara atau lebih. Teori ini menggambarkan bahwa negara bukan merupakan *actor independent* secara keseluruhan, dimana negara saling bergantung satu dengan yang lain. Interdependensi atau saling ketergantungan adalah situasi dimana di dunia politik dimana semua aktor termasuk negara maupun aktor non-negara, saling bergantung satu sama lain karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri.

Suatu negara saling bergantung dengan negara lain mendefinisikan bahwa keadaan ditentukan atau dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan eksternal yaitu aktor negara maupun aktor non-negara. Teori interdependensi menurut Robert O Keohane dan Joseph Nye menjelaskan terdapat situasi dimana masyarakat internasional baik aktor negara maupun non-negara saling ketergantungan dan saling membutuhkan sehingga terjalin kerja sama yang didasari dengan

berbagai kepentingan. Ketergantungan dapat terjadi karena adanya transaksi internasional yakni adanya aliran uang, barang, orang serta informasi yang melintasi batas internasionalnya.

Dalam buku Robert dan Joseph, terdapat dua macam saling ketergantungan yakni saling ketergantungan seimbang dan saling ketergantungan yang tidak seimbang. Saling ketergantungan yang seimbang dilakukan oleh dua negara yang telah memiliki latarbelakang keunggulan yang sama, sehingga dalam kerja sama tersebut terwujud interdependensi sensitif, yang dimana kedua negara tersebut tidak bergantung terhadap negara pasangannya. Dalam kerja sama tersebut, kedua negara melakukan kerja sama untuk meningkatkan potensi atau keunggulan yang dimiliki, bukan untuk melengkapi hal-hal yang tidak dimiliki oleh suatu negara.

Saling ketergantungan tidak seimbang umumnya dilakukan oleh negara yang dominan dan negara tergantung. Negara dominan umumnya adalah negara maju yang sudah memiliki kemajuan dalam teknologi, infrastruktur, energi, industri dan transportasi. Negara tergantung adalah negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin yang memiliki pendapatan perkapita rendah. Interdependensi umumnya terjadi antara negara maju dengan negara berkembang karena salah satu aktor dapat mendorong atau memfasilitasi negara lainnya yang masih terbelakang.

Dalam teori interdependensi, Robert Keohane dan Joseph Nye, menjelaskan terdapat tiga hal yang dapat mendorong perekonomian, menyelesaikan konflik dan masalah, yakni: a. Negara bukan satu-satunya aktor yang signifikan, mengacu pada terdapat aktor lainnya yang melintasi batas-batas wilayah negaranya sebagai pemain utama, b. *hard power* bukan satu-satunya alat yang dapat digunakan, melainkan melalui manipulasi ekonomi dan organisasi atau lembaga internasional menjadi instrumen yang dominan, c. keamanan bukan merupakan tujuan dari kepentingan yang dominan, melainkan kesejahteraan suatu negara. Sehingga dalam teori ini, suatu negara lebih disarankan untuk menggunakan *soft power* dalam pendekatan dalam menghadapi konflik.

Dalam hubungan kerja sama, sebuah pasar merupakan salah satu hal yang penting. Aktor-aktor umumnya mencari hubungan kerja sama untuk mencapai kepentingan bersama dalam jangka panjang. Akibat pentingnya pasar bagi suatu negara menghasilkan suatu kebijakan dalam hubungan kerja sama dengan aktor lainnya. Akan tetapi, Robert O Keohane dan Joseph Nye menyatakan bahwa interdependensi seharusnya tidak sepenuhnya didefinisikan sebagai situasi 'ketergantungan timbal balik yang seimbang'. Mereka berpendapat: "Adalah asimetri dalam ketergantungan yang paling mungkin menjadi sumber pengaruh bagi para aktor dalam urusan mereka satu sama lain. Aktor yang kurang tergantung seringkali dapat menggunakan hubungan saling ketergantungan sebagai sumber kekuatan tawar-menawar atas

suatu isu dan mungkin untuk mempengaruhi isu-isu lain.” (Keohane J. J., 1977).

Hubungan negara yang tidak seimbang atau asimetris dalam suatu ketergantungan memungkinkan untuk mempengaruhi aktor lainnya. Aktor yang kurang tergantung cenderung untuk menggunakan saling ketergantungan untuk dapat mempengaruhi isu-isu lainnya. Sehingga, interdependensi menjelaskan bahwa suatu negara memerlukan negara lainnya karena tidak mampu untuk mencapai kepentingan domestiknya sendiri. Kepentingan dari tiap negara yang berbeda menghasilkan pemenuhan kepentingan internal yang berbeda juga.

Interdependensi antarnegara didefinisikan sebagai sebuah konsep transnasionalis ekonomi yang mengamsumsikan bahwa negara bukan satu-satunya aktor yang penting, melainkan isu-isu keamanan dalam agenda global, dan kerja sama merupakan karakteristik dominan dalam politik internasional seperti halnya konflik (Genest, 1996). Negara yang saling bergantung diasumsikan mengurangi penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan konflik. Hal ini berarti kekuatan militer memiliki peran yang kecil di antarnegara yang bergantung karena kekuatan militer tidak relevan dalam menyelesaikan isu ekonomi dan pembangunan negara aliansi.

Menurut Keohane dan Nye, hubungan yang intens dan saling mempengaruhi dapat terjadi akibat kerja sama, namun kekuatan tidak lagi dianggap sebagai cara yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat ekonomi, karena sebagian besar dampak dari kekuatan militer sangat mahal dan tidak pasti (Keohane & Nye, 1977). Oleh karena itu, dengan adanya ketergantungan suatu negara dengan negara lainnya akan memelihara stabilitas dan *conflict prevention*.

Saling ketergantungan dalam politik internasional mengarah pada kondisi yang dilihat dari efek timbal balik diantara negara-negara atau di antara aktor-aktor pada berbagai negara (Keohane & Nye, 1977, 2001). Dalam konsep ini, ada harga mahal dari efek timbal balik dari transaksi antar aktor, dengan adanya kerja sama antar negara menyebabkan kebijakan dan tindakan suatu aktor akan berdampak besar pada kebijakan dan tindakan aktor lain dan sebaliknya. Teori interdependensi atau saling ketergantungan akan menganalisa hubungan saling ketergantungan dari hubungan kerja sama pembangunan Indonesia dan Tiongkok.

Suatu interdependensi dapat terjadi dalam berbagai isu yakni ekonomi maupun politik. Dalam ekonomi, umumnya terjadi pada investasi dan perdagangan. Interdependensi pada investasi, semakin tinggi jumlah investasi maka akan semakin tinggi resiko pada aktor interdependensi akibat berubahnya pola investasi. Pada sektor

perdagangan, negara akan mengalami kerugian apabila hubungannya diputuskan.

Dalam kerja sama untuk menghasilkan suatu interdependensi dibutuhkan yakni, *power* dan kemampuan tawar menawar. *Power* dan kemampuan tawar menawar digambarkan dengan situasi saling ketergantungan yang tidak sejalan atau asimetris, dalam teori interdependensi menjelaskan bahwa terdapat hubungan timbal balik, namun pada kenyataannya sering kali hubungan yang tercipta asimetris. Rezim internasional akan bersandar pada hubungan interdependensi yang asimetris untuk membuat setiap aktor saling mempengaruhi melalui kebijakan ekonominya dalam memperoleh kepentingan diantara diantara negara-negara tersebut.

Kritik terhadap teori saling ketergantungan menjelaskan bahwa adanya tekanan pada sifat anarkis dari sebuah sistem, sehingga negara lebih memilih keuntungan absolut, bahwa negara berusaha melindungi kekuasaan dan statusnya, negara akan menolak kerja sama yang saling menguntungkan jika mitranya cenderung mendapat keuntungan yang lebih besar. Sebagai contoh, sebuah perlombaan senjata Amerika Serikat-Soviet, kedua belah pihak berfokus pada posisi mereka, masing-masing pihak tidak peduli dengan siapa yang berada di depan atau siapa yang lebih mengancam, selain tingkat persenjataan mereka sendiri. Para ahli teori, memandang bahwa teori saling ketergantungan, negara-negara bukan mencari keuntungan yang relatif tetapi negara membuat

situasi dimana mereka mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan untuk mempertahankan kekuasaan dan status relatif mereka.

Saling ketergantungan yang kompleks menjadi komponen utama dalam perspektif neoliberal yang digunakan dalam analisis politik internasional, yang dipahami sebagai upaya memahami kesediaan negara-negara untuk masuk ke dalam aliansi kooperatif satu sama lain dalam kondisi ketergantungan, dan menekankan Organisasi Internasional dan Perusahaan Multinasional yang semakin meningkat.

Saling ketergantungan dalam neoliberal memandang bahwa semua negara memiliki keuntungan absolut. Namun, Robert Powell berpendapat bahwa masalah keuntungan relatif tergantung pada situasi yang berlaku di dunia, yaitu bermusuhan atau damai. Saling ketergantungan yang asimetris memungkinkan negara tersebut memanfaatkan negara tersebut memanfaatkan struktur jaringan negara secara strategis tanpa merasakan konsekuensinya. Dengan memperkuat jaring ketergantungan, negara dapat berinteraksi secara damai, dan membangun ketergantungan satu sama lain.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Diplomasi Pembangunan

Diplomasi pembangunan merupakan proses membangun citra positif di luar negeri, hubungan bilateral dan peran serta posisi internasional berdasarkan transfer bantuan yang ditujukan untuk mempromosikan pembangunan dan kesejahteraan negara berkembang (United Nations, 2013). Diplomasi pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga entitas non-negara, berbasis *soft power*, komunikasi dua arah, pengelolaan informasi dan berorientasi jangka pendek dan jangka panjang (List of features based on Gilboa, *Diplomacia w epoce informacji*, 2008).

Diplomasi pembangunan berada dalam naungan diplomasi publik yang membangun hubungan bilateral berdasarkan aktivitas yang dibentuk sebagai memajukan pembangunan dan kesejahteraan negara berkembang (Pamment, 2016). Diplomasi publik memiliki sejarah yang panjang dalam menyebarkan *soft power* suatu negara, termasuk kemampuannya dalam memperoleh hasil yang diinginkan melalui persuasi daripada paksaan atau pembayaran (Nye, 2019).

Diplomasi pembangunan berarti tidak hanya sarana untuk meningkatkan *soft power* tetapi hanya mengandalkan sumber daya *soft power* untuk mencapai tujuan diplomasi publiknya. Suatu aktor yang

memberikan bantuan pembangunan mungkin sebagian berorientasi untuk menumbuhkan citra dan legitimasi negara modern, yang pada akhirnya memberi negara tersebut akses untuk dapat memberi negara tersebut akses ke potensi manfaat ekonomi, strategis, atau keamanan yang keras (Gulrajani, 2017). Akan tetapi, transisi tersebut didasarkan pada sumber *soft power* yang ada, seperti non-intervensi, solidaritas dan kesetaraan (Fukuda-Parr & Mawdsley, 2016). Keinginan negara pemberi bantuan dapat juga mencakup melayani berbagai kepentingan kebijakan luar negeri melalui keterlibatan pembangunan dan investasi (Farias D, 2014).

Diplomasi pembangunan merupakan proses suatu negara dalam membentuk citra dan pandangan yang positif dalam lingkup global maupun bilateral, yang didasarkan pada kiriman bantuan yang diberikan untuk mempromosikan pembangunan serta kesejahteraan negara penerima. Diplomasi pembangunan dapat disebut sebagai bagian baru dalam diplomasi baru karena mempunyai kesamaan dalam satu maupun lebih dari diplomasi publik baru. Seperti misalnya, diplomasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun juga entitas non-negara, yang dilakukan berdasarkan *soft power*; komunikasi dua arah; informasi yang teruji; dan berorientasi jangka panjang maupun jangka pendek (Ziellińska, 2013).

1.7.1.2 Kerja sama Pembangunan Internasional

Kerja sama internasional merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mendukung orang yang membutuhkan dan mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di seluruh dunia. Kerja sama internasional dapat meliputi bidang kemanusiaan, kerja sama pembangunan dan promosi perdamaian. Kerja sama pembangunan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kerja sama pembangunan didasarkan pada kemitraan dan aktif pada tingkat lokal, regional dan global. Tujuan utama dari kerja sama pembangunan adalah untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga dapat mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, dapat mengintegrasikan negara-negara mitra ke dalam ekonomi global dan memperkuat daya saing pasar domestik mereka.

Dalam mencapai cita-cita dunia tanpa kemiskinan, konflik dan kerusakan ekologis diperlukan Kerja sama pembangunan internasional. Hal tersebut bukan hanya tanggung jawab satu negara, tetapi juga tanggung jawab komunitas global dalam menangani masalah-masalah di ranah internasional. Dengan adanya kerja sama internasional dalam pembangunan akan berdampak pada pembangunan internasional yang akan membangun setiap khususnya pada bidang perekonomian suatu negara.

1.7.2 Definisi Operasional

1.7.2.1 Diplomasi Pembangunan

Diplomasi pembangunan yang dilakukan Tiongkok di Indonesia direalisasikan melalui dukungan Tiongkok dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilakukan. Dengan langkah diplomasi pembangunan, Tiongkok berusaha untuk menciptakan citra positif di Indonesia dengan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin meningkatkan pembangunan pada masa pemerintahannya. Dengan keterbatasan dana, Tiongkok memberikan bantuan dana melalui pinjaman dan investasi kepada Indonesia untuk meningkatkan hubungan positif yang nantinya akan melahirkan reaksi timbal balik berupa ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok dalam segala aspek baik ekonomi, politik dan sosial. Selain itu, diplomasi pembangunan yang dilakukan Tiongkok merupakan suatu langkah untuk memperluas pengaruhnya di Asia dan meningkatkan perdagangannya khususnya pada jalur perdagangan Tiongkok. Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi yang cukup stabil di Asia Tenggara menyebabkan ketertarikan Tiongkok untuk memberi bantuan kepada Indonesia berupa pinjaman dan investasi. Sebaliknya, Indonesia melalui pembangunan tersebut akan mengembangkan sektor-sektor lainnya, salah satu mengimplementasikan Global Maritime Fulcrum (GMF).

1.7.2.2 Kerja sama Pembangunan Internasional

Dalam kerja sama pembangunan peneliti akan menjelaskan mengenai pembangunan di Indonesia yang dilakukan oleh BRI. Kerja sama pembangunan yang dilakukan oleh BRI merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk pembangunan kembali jalur sutra baik di darat maupun di laut. Proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi dan kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia. Tiongkok memberikan banyak pinjaman utang kepada Indonesia dengan tujuan mendorong pembangunan agar kemiskinan di Indonesia dapat segera diatasi. Kerja sama tersebut juga merupakan strategi Tiongkok untuk memperkuat pengaruh ekonominya melalui proyek dan pembangunan di beberapa negara yang dilewati jalur tersebut. Sedangkan, Indonesia melalui kerja sama dengan Tiongkok, berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan di berbagai kawasan Indonesia.

1.8 Argumen Penelitian

Peneliti memiliki pendapat bahwa dampak dari saling ketergantungan dalam kerja sama pembangunan melalui saling ketergantungan adalah menimbulkan keselarasan visi pembangunan bagi Indonesia dan Tiongkok. Keselarasan tersebut dapat mengembangkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam kerja sama tersebut juga menggambarkan adanya saling ketergantungan yang tidak seimbang oleh Tiongkok. Dalam proses

kerja sama tersebut, Tiongkok sebagai negara yang memiliki keunggulan dalam berbagai hal, menunjukkan bahwa Tiongkok dalam kerja samanya memanfaatkan Indonesia sebagai upaya untuk memperluas kepentingannya karena sudah memiliki keunggulan atau potensi sehingga hanya perlu untuk meningkatkannya.

1.9 Metodologi Penelitian

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menguraikan dan mengungkapkan metode penelitian. Metode deskriptif adalah metode yang berusaha menyusun, menginterpretasikan dan mengumpulkan data yang kemudian diajukan dengan menganalisis data tersebut terlebih dahulu dengan menggunakan metode deskriptif yang meneliti suatu kondisi, sistem pikiran, suatu objek dan suatu peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau kejadian. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan data yang di dapat melalui proyek pembangunan dari BRI di Indonesia sebagai acuan untuk melakukan metode penelitian.

1.9.1 Tipe Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Menurut Susan E.W, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat eksplorasi. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai opini, motivasi, dan alasan yang mendasari suatu perilaku. Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh

wawasan dalam suatu masalah dan membantu untuk mengembangkan ide-ide.

Penelitian kualitatif yang digunakan bertujuan untuk mengungkapkan trends dibalik sebuah pendapat dan pemikiran seseorang yang membuat peneliti untuk lebih menyelam lebih dalam kepada masalah yang akan diteliti. Dalam mengumpulkan data pada penelitian kualitatif adalah dengan berupa analisis deskriptif, dimana peneliti akan melakukan pengumpulan data lalu akan disusun untuk dianalisa dengan menggunakan metode yang ditentukan.

Dalam penelitian kualitatif eksplanatif ini, peneliti berusaha untuk menguraikan dan mengungkapkan dari suatu kasus yang diteliti dengan menggunakan fakta-fakta yang diperoleh dari suatu fenomena, aktivitas, proses, dan sekelompok individu. Peneliti juga menggunakan sumber-sumber media online terpercaya untuk memperoleh fakta. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menguraikan dan menjelaskan implikasi dari saling ketergantungan antara Indonesia melalui kerja sama pembangunan dalam BRI. Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Tiongkok berfokus pada sektor pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masing-masing negara.

1.9.2 Situs dan Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan studi yang berlangsung dalam situasi alamiah, sehingga dalam penelitian untuk membantu mencari sumber data yang dibutuhkan dan digunakan dalam penulisan ini, peneliti melakukan penelitian melalui media digital dengan sumber yang terpercaya melalui buku, media digital, berita dan berdasarkan peristiwa yang terjadi.

Subjek penelitian adalah suatu bahasan yang sering ditemukan pada suatu penelitian. Manusia, perilaku, tindakan, maupun organisasi (lembaga) sifat keadaannya akan diteliti sehingga sesuatu yang melekat terdapat didalamnya terkandung objek penelitian. Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini adalah Proyek Pembangunan Tiongkok-Indonesia: Saling Ketergantungan Indonesia melalui BRI terhadap Tiongkok.

1.10 Jenis Data dan Sumber Data

1.10.1 Jenis Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dua macam jenis data pada umumnya. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang merupakan jenis data yang disajikan dalam bentuk verbal dan tidak berupa bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian, meliputi sejarah singkat mengenai hubungan antara Indonesia dan Tiongkok,

proyek pembangunan Tiongkok di Indonesia dan membahas dinamika BRI di Indonesia.

1.10.2 Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penulis hanya menggunakan data yang bersifat kredibel dan relevan. Maka penulis menggunakan tiga prinsip pencarian yang relevan dengan kata kunci penelitian, publikasi dan berita terpercaya. Pengumpulan data dari berbagai sumber tersebut akan digunakan untuk mempermudah proses pemahaman permasalahan sehingga akan menghasilkan analisis yang sesuai dengan data.

1.10.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik kongruen sebagai teknik menganalisis data. Peneliti akan menggunakan berupa asumsi dasar dari teori yang telah digunakan untuk kemudian dihubungkan dengan fakta dan bukti data yang telah diperoleh peneliti dalam melakukan penyusunan dalam penelitian ini.

Peneliti memanfaatkan sumber-sumber jurnal internasional dan memanfaatkan situs-situs berita. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami situasi sosial yang kompleks. Hasil dianalisis mampu memberikan penjelasan terkait faktor-faktor yang menyebabkan kerja sama pembangunan membentuk saling ketergantungan Indonesia terhadap Tiongkok melalui proyek BRI.

1.10.4 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Setelah mendapatkan data yang kredibel melalui teknik pengumpulan data *literature research*, peneliti melakukan langkah-langkah untuk analisis data dengan menggunakan data kongruen. Untuk melanjutkan proses tersebut, peneliti menggabungkan teknik kongruensi yang dicapai dengan mencari kecocokan antara variabel dan teori dengan data yang ditemukan selama proses penelitian. Teori yang digunakan dalam metode ini berfungsi sebagai tolak ukur apakah argument penelitian cocok dengan data. Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan bagaimana dampak dari saling ketergantungan dalam kerja sama pembangunan antara Indonesia dan Tiongkok melalui BRI.

Dalam menganalisis data, peneliti melakukan tahap yang terdiri dari tiga tahap penelitian kualitatif yang berpedoman pada Miles dan Habermas pada analisis data yang dilakukan akan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan data yang telah diperoleh dengan menghasilkan wawasan yang luas.